



Judul : Menguji netralitas pemerintah dan ASN dalam Pemilu 2024  
Tanggal : Sabtu, 11 Nopember 2023  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : A2

[Back To Homepage](#)

Media Indonesia / 11 NOV 2023  
Page 19 of 19

MEDIA  
INDONESIA

F O K U S

SABTU, 11 NOVEMBER 2023

CUSTOMER SERVICE:  
(021) 5801303  
PEMASANGAN IKLAN:  
(021) 5812115 / 5801400

HALAMAN A2

# Menguji Netralitas Pemerintah dan ASN dalam Pemilu 2024



KEHADIRAN para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kontestan pada pentas Pileg dan Pilpres 2024 dapat menimbulkan beragam persoalan. Di satu sisi, hal itu bisa menjadi peluang bagi para menteri untuk meningkatkan elektabilitas mereka lewat akses, jaringan, dan popularitas yang mereka miliki. Namun, di sisi lain, kehadiran para menteri Jokowi pada Pileg dan Pilpres 2024 juga bisa menimbulkan sejumlah tantangan, di antaranya kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan wewenang, semisal menggunakan anggaran kementerian untuk kampanye atau menggunakan wewenang jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau partai politiknya.

Selain itu, tantangan lainnya ialah kemungkinan pengendalian ASN. Para menteri Jokowi yang ikut kontestasi Pilpres 2024 juga memiliki kemungkinan untuk mengendalikan ASN di bawah mereka untuk kerja-kerja pemenangan. Hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan insentif atau tekanan kepada ASN untuk mendukung kandidat yang mereka usung.

Tentu yang paling dikhawatirkan ialah ketidaknetralan pemerintahan. Kehadiran para menteri Jokowi pada Pileg dan Pilpres 2024 bisa menimbulkan kesan bahwa pemerintahan Jokowi tidak netral. Hal itu disebabkan para menteri tersebut memiliki kepentingan politik pribadi yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintahan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan, salah satunya ialah mendorong para menteri Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Dengan begitu, para menteri tersebut tidak akan memiliki akses, jaringan, popularitas, dan legitimasi yang bisa mereka manfaatkan untuk kepentingan politik elektoral. (\*L-4)

## Pentingnya Netralitas Pemerintah dalam Pemilu

- Menjamin kredibilitas dan integritas proses demokrasi.
- Menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
- Menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua peserta pemilu.
- Menjamin kredibilitas dan legitimasi hasil pemilu.
- Menjamin kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

